

## Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo

Supriyadi, Armandelis dan Selamat Rahmadi

Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi

**Abstract.** The purpose of this study was to measure and analyze the degree of fiscal decentralization in Bungo district during the years 2000 to 2010 as well as analyzing the relationship of GDP to the degree of fiscal decentralization during the same period. The results of this study indicate that the degree of fiscal decentralization PAD average of only 9.247, which means much less, then the Tax Revenue and Non Tax even though the degree of fiscal decentralization is higher in the amount of 10.434, but still lacking in the category. Furthermore, to donations / aid from the Provincial and Local Grants instead showed a lower value of the degree of fiscal decentralization of local revenue, which amounted to only 3.187 (much less). This indicated that the District Government of Bungo still very large dependence on the Central Government. It is also indicated by the high ratio of financial dependency Bungo Regency on income transfers from the central government which is an average of 87.57%. The study also showed that the association of GDP with the degree of fiscal decentralization component of revenue (PAD) is negative (-0.180). Further to the relationship of GDP to fund components of the degree of fiscal decentralization Tax Revenue and Non-Tax showed a positive relationship with a value of 0.715. While GDP relationship with the degree of fiscal decentralization component Donations / aid from the Provincial and Local Grants are also positively related to the value of 0.648.

*Keywords: decentralization, fiscal decentralization*

### PENDAHULUAN

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah merupakan kebijaksanaan desentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat. Menurut Dilliger, dalam Sidik, (2002), pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi, yaitu: Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik, desentralisasi

administrative (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu. desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi.

Keberhasilan otonomi daerah tak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Menurut Prawirosetoto (2002), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public service*).

Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal.

Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin menurun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan

tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan.

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut diatas, kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif.

Menurut Halim (2007), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap

sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Selanjutnya semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang mengalami peningkatan realisasi pendapatan daerah sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bungo pada periode 2000-2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, realisasi PAD yang diperoleh Kabupaten Bungo sebesar Rp.3,97 milyar lebih dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp.46,68 milyar lebih pada tahun 2010. Sedangkan total realisasi pendapatan daerah pada periode 2000-2010 juga mengalami peningkatan secara berkala. Pada tahun 2000, total realisasi pendapatan daerah yang diperoleh Kabupaten Bungo sebesar Rp.48,82 milyar lebih dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga sebesar Rp.621,506 milyar lebih pada tahun 2010. Selanjutnya perkembangan PDRB Kabupaten Bungo dari tahun 2000 sampai dengan 2010 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2000 PDRB Kabupaten Bungo (dalam jutaan) sebesar Rp663.450,97 selanjutnya terus meningkat sehingga mencapai Rp1.289.077,03 pada tahun 2010. Dua kondisi ini cukup menunjukkan bahwa pada masa desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten Bungo telah memanfaatkan kewenangan yang dimiliki-

nya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan PDRB secara optimal.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengukur dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bungo selama tahun 2000 sampai dengan 2010; (2) Menganalisis hubungan PDRB terhadap derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bungo selama tahun 2000 sampai dengan 2010.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan runtun waktu periode 2000-2010. Digunakan data berdasarkan kurun waktu ini berdasarkan pertimbangan ketersediaan data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Realisasi APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2000 sampai dengan 2010; (2) PDRB Kabupaten Bungo tahun 2000 sampai dengan 2010

### Sumber Data

Adapun sumber data berupa buku-buku laporan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, yang diperoleh dari berbagai instansi terkait

### Alat Analisis Data.

#### a. Analisis Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal (Reksohadiprojo, 2004) berikut :

- $$1. \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

2. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak  
Total Penerimaan Daerah
3. Sumbangan Daerah (SB)  
Total Penerimaan Daerah

Jika nilainya tinggi, menunjukkan, derajat desentralisasinya besar (mandiri).

Selanjutnya untuk mengetahui rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian daerah digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Keuangan Daerah} + \text{Total Pendapatan Daerah}}$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Keuangan Daerah} + \text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}}$$

Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri pada tahun 1991 (Tan, 2010) tolak ukur derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Nilai rasio antara 0,00% s/d 10% dikategorikan kriteria sangat kurang
2. Nilai rasio antara 10,1 s/d 20% dikategorikan kriteria kurang
3. Nilai rasio antara 20,1% s/d 30% dikategorikan kriteria sedang
4. Nilai rasio antara 30,1% s/d 40% dikategorikan kriteria cukup
5. Nilai rasio antara 40,1% s/d 50% dikategorikan kriteria baik
6. Nilai rasio di atas 50% dikategorikan sangat baik.

#### b. Analisis Korelasi.

Untuk menjawab hipotesis kedua yaitu diduga PDRB memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kemandirian fiskal di Kabupaten Bungo, maka digunakan alat uji korelasi sederhana Pearson (*Product Moment Coefficient of Correlation*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Desentralisasi Fiskal Pendapatan Asli Daerah (DDF PAD).

Rata-rata Desentralisasi Fiskal Pendapatan Asli Daerah (DDF PAD) selama periode 2000 - 2010 adalah 9,25% kondisi ini menggambarkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sangat kurang. Jika dianalisis lebih lanjut pada komponen PAD ternyata Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan rata-rata DDF-nya hanya 0,75%, disusul oleh rata-rata DDF Pajak Daerah 0,88 %, kemudian rata-rata DDF Lain-lain PAD 3.34% dan rata-rata DDF Retribusi Daerah 4,27%. Dengan demikian penyebab utama dari sangat kurangnya DDF PAD adalah DDF Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan DDF Pajak Daerah.

DDF PAD tertinggi terjadi tahun 2003 yaitu 13,43% dan terendah tahun 2010 yaitu 7,51%. DDF PAD tertinggi pada tahun 2003 disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari peningkatan Total Penerimaan Daerah. Peningkatan PAD tersebut berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah, yang masing-masing meningkat sebesar 53,98%, 55,47% dan 153,11%. Demikian juga DDF PAD terendah terjadi pada tahun 2010 disebabkan persentase peningkatan total pendapatan daerah lebih besar dari persentase peningkatan PAD. Peningkatan total pendapatan daerah tersebut berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU, dan DAK yang masing-masing meningkat sebesar 72,61%, 0,17% dan 31,21%.

Sangat kurangnya derajat desentralisasi fiskal dari komponen PAD menunjukan Kabupaten Bungo selama periode 2000 – 2010 masih sangat tergantung kepada penerimaan yang bersumber di luar PAD, seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Rincian lebih lanjut atas derajat desentralisasi fiskal dari komponen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bungo selama periode 2000 – 2010 adalah sebagai mana tabel berikut :

**Tabel 1. Derajat Desentralisasi Fiskal dari PAD (DDF PAD) Kabupaten Bungo**

Tahun	DDF (%)	Keterangan
2000	8,15	Sangat kurang
2001	8,25	Sangat kurang
2002	10,11	Kurang
2003	13,43	Kurang
2004	9,54	Sangat kurang
2005	8,75	Sangat kurang
2006	6,98	Sangat kurang
2007	9,03	Sangat kurang
2008	11,91	Kurang
2009	8,06	Sangat kurang
2010	7,51	Sangat kurang
<b>Rata-rata</b>	<b>9,25</b>	<b>Sangat kurang</b>

Sumber : DPPKAD Kab. Bungo

#### **Desentralisasi Fiskal Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DDF BHPBP).**

Rata-rata DDF Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DDF BHPBP) selama periode 2000 - 2010 adalah 10,43% yang berarti termasuk dalam katagori kurang. Jika dianalisis lebih lanjut pada komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ternyata Bagi Hasil Pajak rata-rata DDF-nya hanya 5,72% disusul oleh rata-rata DDF Bagi Hasil Bukan Pajak 4,71 %. Dengan demikian rata-rata DDF Bagi Hasil Pajak dan rata-rata DDF Bagi Hasil Bukan Pajak adalah sama sangat kurang.

Dari data tersebut juga menunjukan DDF BHPBP tertinggi terjadi tahun 2010 yaitu 17,05%, dan terendah tahun 2001 yaitu 4,65%. DDF BHPBP tertinggi pada tahun 2010 disebabkan adanya peningkatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak lebih besar dari peningkatan total Pendapatan Daerah yang berasal dari alokasi kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Secara persentase masing-masing komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak peningkatannya pada tahun

2010 sebesar 27,05% untuk Bagi Hasil Pajak dan 106,35% untuk peningkatan Bagi Hasil Bukan Pajak.

Rincian lebih lanjut atas derajat desentralisasi fiskal dari komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DDF BHPBP) Kabupaten Bungo selama periode 2000 – 2010 adalah sebagai mana tabel berikut ini :

**Tabel 2. Derajat Desentralisasi Fiskal dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DDF BHPBP) Kabupaten Bungo**

Tahun	DDF ( % )	Keterangan
2000	9,942	Sangat kurang
2001	4,653	Sangat kurang
2002	4,776	Sangat kurang
2003	6,975	Sangat kurang
2004	10,726	Kurang
2005	13,219	Kurang
2006	13,062	Kurang
2007	12,204	Kurang
2008	10,376	Kurang
2009	11,786	Kurang
2010	17,054	Kurang
<b>Rata-rata</b>	<b>10,434</b>	<b>Kurang</b>

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bungo

#### **Desentralisasi Fiskal Dana Sumbangan/Hibah dan Bantuan Keuangan (DDF SB).**

Rata-rata DDF Sumbangan/Hibah dan Bantuan Keuangan berupa Bagi Hasil Pajak dan bantuan dari Pemerintah Provinsi serta Hibah Daerah selama periode 2000 - 2010 adalah 3,19% yang berarti termasuk kriteria sangat kurang. Jika dianalisis lebih lanjut pada komponen Sumbangan/Hibah dan Bantuan Keuangan ternyata Hibah Daerah rata-rata DDF-nya hanya 0,06%, disusul oleh rata-rata DDF Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar 0,14%, kemudian rata-rata DDF Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar 2,99%. Dengan demikian penyebab utama dari sangat kurangnya DDF Sumbangan/Hibah

dan Bantuan Keuangan adalah DDF Hibah Daerah dan DDF Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, hal ini bisa terjadi dikarenakan sejak tahun 2000, baru mulai tahun 2008 Pemda Kabupaten Bungo mendapatkan aloksi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi. Sejak tahun 2001 Pemda Kabupaten Bungo hanya menerima dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berupa Bagi Hasil Pajak. Selain itu penerimaan Hibah Daerah baru ada sejak tahun 2010, berupa hibah daerah dari perusahaan tambang batu bara dan perusahaan perkebunan karet dan sawit.

Selanjutnya dari hasil tersebut, tertinggi terjadi tahun 2010 yaitu 4,68%, dan terendah tahun 2000 yaitu 0%. Kontribusi tertinggi pada tahun 2010 tersebut disebabkan karena adanya peningkatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan dari Pemerintah Provinsi serta Hibah Daerah lebih besar dari peningkatan total Pendapatan Daerah. Untuk Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi terjadi kenaikan sebesar 28,44% pada tahun 2010, selain itu juga pada tahun 2010 mulai diterimanya Hibah daerah.

**Tabel 3. Derajat Desentralisasi Fiskal dari Sumbangan/Hibah dan Bantuan Keuangan (DDF SB) Kabupaten Bungo**

Tahun	DDF SB ( % )	Keterangan
2000	-	Sangat kurang
2001	0,387	Sangat kurang
2002	2,157	Sangat kurang
2003	3,665	Sangat kurang
2004	4,494	Sangat kurang
2005	4,725	Sangat kurang
2006	3,914	Sangat kurang
2007	2,614	Sangat kurang
2008	4,073	Sangat kurang
2009	4,347	Sangat kurang
2010	4,678	Sangat kurang
<b>Rata-rata</b>	<b>3,187</b>	<b>Sangat kurang</b>

Sumber : DPPKAD Kab. Bungo (data diolah)

### **Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Untuk melihat ketergantungan keuangan daerah dapat dianalisis dengan membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang diterima dari otoritas pemerintah di atasnya, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang meliputi Dana Perimbangan, Dana Penyesuaian, Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Dari hasil analisis rata-rata ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi selama periode 2000 - 2010 adalah 87,57% tertinggi terjadi tahun 2000 yaitu 91,85% dan terendah tahun 2003 yaitu 82,91%. Ketika rasio ketergantungan keuangan daerah tinggi, ternyata derajat desentralisasi fiskal (DDF) dalam kriteria sangat kurang. Hal ini terlihat pada tahun 2000 saat rasio ketergantungan keuangan daerah tinggi, DDF PAD adalah 8,15% (sangat kurang), DDF BHPBP sebesar 9,94% (sangat kurang) dan DDF SB sebesar 0% (sangat kurang). Selain itu juga ketergantungan keuangan daerah disebabkan antara lain besar-kecilnya Pendapatan Asli Daerah, hal ini terlihat pada saat ketergantungan keuangan daerah tinggi, maka PAD-nya kecil. Data Tahun 2000 menunjukkan realisasi PAD hanya sebesar Rp.3,97 milyar lebih. Sedangkan pada saat rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami penurunan, ternyata derajat desentralisasi fiskal (DDF) berubah menjadi kriteria kurang. Hal ini terlihat pada tahun 2003 DDF PAD menjadi 13,43% (kurang). Dengan demikian besarnya rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Pemerintah Pusat juga dibarengi oleh kurang atau baiknya kriteria DDF.

Selanjutnya dari komponen pendapatan transfer ternyata rata-rata kontribusi terbesar adalah berasal dari

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 67,72%, dan kontribusi terkecil adalah yang berasal dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 0,14%.

**Tabel 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo**

Tahun	Rasio Ketergantungan ( % )
2000	91,85
2001	91,75
2002	89,89
2003	86,57
2004	90,46
2005	91,25
2006	93,02
2007	90,97
2008	88,09
2009	91,94
2010	91,84
<b>Rata-rata</b>	<b>90,69</b>

Sumber : DPPKAD Kab. Bungo

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk melihat kemandirian keuangan daerah dapat dianalisis dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan transfer. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama periode 2000 - 2010 adalah 10,24% yang berarti kurang. Hasil tertinggi terjadi tahun 2003 yaitu 15,51%, dan terendah tahun 2006 yaitu 7,50%. Kontribusi tertinggi pada tahun 2003 disebabkan adanya peningkatan PAD lebih besar dari peningkatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah akan dibarengi dengan penurunan rasio ketergantungan keuangan daerah, dan sebaliknya.

Ketika rasio kemandirian keuangan daerah rendah, ternyata derajat desentralisasi fiskal (DDF) dalam kriteria juga kurang. Hal ini terlihat pada tahun 2006 saat rasio ketergantungan keuangan

daerah rendah (7,50%), DDF PAD adalah 6,98% (sangat kurang), DDF BHPBP sebesar 13,06% (kurang) dan DDF SB sebesar 3,91% (sangat kurang). Selain itu juga kemandirian keuangan daerah disebabkan antara lain besar-kecilnya Pendapatan Asli Daerah, hal ini terlihat pada saat PAD meningkat kemandirian keuangan juga meningkat.

**Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bungo**

Tahun	Rasio Kemandirian ( % )
2000	8,87
2001	8,99
2002	11,24
2003	15,51
2004	10,55
2005	9,59
2006	7,50
2007	9,93
2008	13,51
2009	8,77
2010	8,18
<b>Rata-rata</b>	<b>10,24</b>

Sumber : DPPKAD Kab. Bungo

#### Hubungan PDRB Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk melihat hubungan masing-masing komponen DDF dengan PDRB dipergunakan alat uji korelasi sederhana Pearson (*Product Moment Coefficient of Correlation*) yang hasilnya sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini.

Dari tabel 6 menunjukkan bahwa hubungan PDRB dengan Derajat Desentralisasi Fiskal komponen Pendapatan Asli Daerah (DDF PAD) ternyata memiliki hubungan negatif yang sangat rendah (-0,180) dan tidak signifikan. Hubungan tersebut adalah negatif yang berarti bila nilai variabel PDRB meningkat, maka nilai dari variabel DDF SB akan menurun. Hal ini dapat terjadi di Kabupaten Bungo bahwa peningkatan



PDRB tidak dapat mempengaruhi peningkatan DDF PAD. Hal ini bisa terjadi dikarenakan faktor lain di luar PDRB yang tidak diteliti yang mempengaruhi DDF PAD. Misalnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya

**Tabel 6. Hubungan PDRB dengan DDF Kabupaten Bungo Periode**

		PDRB
PDRB	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.
	Sum of Squares and Cross-products	4,5E+11
	Covariance	4,5E+10
	N	11
DDF PAD	Pearson Correlation	-,180
	Sig. (2-tailed)	,597
	Sum of Squares and Cross-products	-738602
	Covariance	-73860,2
	N	11
DDF BHPBP	Pearson Correlation	,715*
	Sig. (2-tailed)	,013
	Sum of Squares and Cross-products	5709432
	Covariance	570943,2
	N	11
DDF SB	Pearson Correlation	,648*
	Sig. (2-tailed)	,031
	Sum of Squares and Cross-products	2329504
	Covariance	232950,4
	N	11

Selanjutnya hubungan PDRB dengan Derajat Desentralisasi Fiskal Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DDF BHPBP) adalah positif dengan kategori cukup, yang ditunjukkan dengan nilai korelasinya terhadap PDRB sebesar 0,715 dan signifikan. Hubungan tersebut adalah positif (*positive relations*) yang berarti bila nilai variabel PDRB meningkat, maka akan meningkatkan nilai dari variabel DDF BHPBP.

Sementara itu hubungan PDRB dengan Derajat Desentralisasi Fiskal Sumbangan/Bantuan dari Provinsi Jambi dan

Hibah Daerah (DDF SB) ternyata juga positif dengan nilai 0,648 dan signifikan dalam kategori cukup, walau lebih rendah dari Derajat Desentralisasi Fiskal Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Hal ini berarti bila nilai variabel PDRB meningkat, maka akan meningkatkan nilai dari variabel DDF SB.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan derajat desentralisasi fiskal (DDF) di Kabupaten Bungo tidak dapat diterima sepenuhnya. Hal ini karena satu dari tiga hubungan antara PDRB dengan DDF hasilnya negatif dan tidak signifikan yaitu hubungan antara PDRB dengan DDF PAD.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bungo adalah sangat kurang. Untuk Pendapatan Asli Daerah, derajat desentralisasi fiskalnya rata-rata hanya sebesar 9,247 yang berarti sangat kurang, kemudian Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak walau derajat desentralisasi fiskalnya lebih tinggi yaitu sebesar 10,434 namun masih dalam kategori kurang. Selanjutnya untuk Sumbangan/Bantuan dari Provinsi dan Hibah Daerah malah menunjukan nilai yang lebih rendah dari derajat desentralisasi fiskalnya Pendapatan Asli Daerah, yaitu hanya sebesar 3,187 (sangat kurang).
2. Untuk hubungan PDRB dengan derajat desentralisasi fiskal komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) hubungannya adalah negatif (-0,180) dan tidak signifikan. Selanjutnya untuk hubungan PDRB dengan derajat desentralisasi fiskal komponen dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menunjukan hubungan yang positif dengan nilai sebesar 0,715 dan



signifikan. Sedangkan hubungan PDRB dengan derajat desentralisasi fiskal komponen Sumbangan/Bantuan dari Provinsi dan Hibah Daerah hubungannya juga positif dengan nilai sebesar 0,648 dan signifikan.

### Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bungo, sebagai berikut :

1. Perlu upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang ada dengan dibarengi dengan menertibkan dan mengintensifkan pemungutan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada. Selain itu juga perlu perbaikan pengelolaan dan penagihan pendapatan daerah dengan tetap dibarengi dengan mendorong peningkatan laju investasi di daerah.
2. Perlu peningkatan penerimaan daerah di luar PAD seperti dana bagi hasil dan sumbangan/bantuan dari Provinsi Jambi serta Hibah Daerah. Saat ini hibah daerah dirasa belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan penerimaan daerah padahal di Kabupaten Bungo potensi tambang batu bara dan hasil bumi berupa karet dan kelapa sawit cukup besar, yang tentu saja hal ini dapat digali lebih intensif lagi bagi peningkatan penerimaan daerah dari sektor hibah daerah dari perusahaan swasta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta
- Basuki, 2008, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Brodjonegoro, B., (2004). *Three Years of Fiscal Decentralization in Indonesia: Its Impacts on Regional Economic Development and Fiscal Sustainability*. Hitotsubashi Conference
- Gujarati, Damodar, 2003, *Essentials of Econometric*, McGraw Hill, International Editions.
- Halim, Abdul, 2002, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2007, *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi ketiga, Salemba Empat, Jakarta
- Hamzah, Ardi, 2007, *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur* (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001–2006), Univ. Trunojoyo, Bangkalan
- Ladjin, Nurjanna, 2008, *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah)*, (Tesis Tidak dipublikasikan), Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2010, *Ekonomi Publik*, edisi ketiga, Badan Penerbit FE-UGM, Yogyakarta
- Mardiasmo, 1999, *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta
- Prawirosetoto, Yuwonono, 2002, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 Agustus, Unika Atmajaya, Jakarta
- Puspita, Intan, 2009, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah di Surakarta (Studi Empiris di Surakarta Tahun Anggaran 2006-*

- 2007), Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2001, *Ekonomika Publik*, BPFE, Yogyakarta,
- Riduwan dan Sunarto, 2010, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Ritonga, Irwan Taufiq, 2010, *Analisis Standar Belanja: Konsep, Metode Pengembangan dan Implementasi di Pemerintah Daerah*, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta
- Sidik, Machmud, 2002, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*, Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002.
- Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung
- Sumarsono, Hadi, 2009, *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999 - 2004)*, Jurnal, JESP Vol. 1, No. 1, hal.13 -26
- Suprajitno, Puji, 2003, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal* (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara), (Tesis tidak dipublikasikan), Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Tan, Syamsurijal, 2010, *Perencanaan Pembangunan – Teori dan Implementasi pada Pembangunan Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Jambi
- Todaro, M. P dan Smith S.C, 2004, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa Harris Munandar dan Puji A.L, Erlangga Jakarta
- Udjianto, Didi. Welly, 2005. *Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen Periode 1998 – 2002)*. Ekobis, Vol. 6, No. 1, Januari 2005.
- Usman, Husnaini dan Akbar, Purnomo S, 2009, *Pengantar Statistika*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Yogyakarta
- Yuliati, T., 2002, *Potensi Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal*, (Tesis tidak dipublikasikan), Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.